

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
*FRAUD CONTROL PLAN* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

oleh

**EVI RATNAWATI SETYANINGSIH  
2221031014**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
*FRAUD CONTROL PLAN* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**Evi Ratnawati Setyaningsih**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan *Fraud Control Plan* (FCP) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus korupsi di sektor pemerintahan yang mengindikasikan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi moderasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada pegawai bagian akuntansi dan pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. *Fraud Control Plan* secara signifikan memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan, namun tidak memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi SDM dan sistem pengawasan yang ketat, didukung oleh strategi *Fraud Control Plan*, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mengoptimalkan *Fraud Control Plan* untuk memitigasi risiko kecurangan.

**Kata Kunci:** Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Internal, Kualitas Laporan Keuangan, *Fraud Control Plan*

## ABSTRACT

### **THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND INTERNAL SUPERVISION ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS WITH *FRAUD CONTROL PLAN* AS A MODERATING VARIABLE IN LOCAL GOVERNMENTS OF LAMPUNG PROVINCE**

By

**Evi Ratnawati Setyaningsih**

This study aims to analyze the effect of human resource competence, internal control systems, and internal supervision on the quality of local government financial reports, with the *Fraud Control Plan* (FCP) as a moderating variable. This research is motivated by the high incidence of corruption in the government sector, indicating weak transparency and accountability in financial reporting. The study employs a quantitative method using a moderated regression analysis technique. Data were collected through questionnaires distributed to accounting and financial reporting staff at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Lampung Province. The results indicate that human resource competence, internal control systems, and internal supervision positively affect the quality of financial reports. The *Fraud Control Plan* significantly moderates the effect of human resource competence and internal supervision on financial report quality but does not moderate the relationship between internal control systems and financial report quality. These findings suggest that strengthening human resource competence and a rigorous supervision system, supported by fraud prevention strategies, can enhance transparency and accountability in local government financial reporting. Therefore, a more comprehensive policy is needed to improve human resource quality, reinforce internal supervision systems, and optimize the *Fraud Control Plan* to mitigate fraud risks.

**Keywords:** Human Resource Competence, Internal Control System, Internal Supervision, Financial Report Quality, *Fraud Control Plan*

Judul Tesis : **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN *FRAUD CONTROL PLAN* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Evi Ratnawati Setyaningsih*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031014

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

*Roga'*  
Prof. Dr. Rinda Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak  
NIP. 197506202000122001

## MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Sekretaris : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.**

Penguji Utama : **Dr. Fajar Gustiawati, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Anggota Penguji : **Dr. Retno Yuni NS, S.E., M.Si., Ak.**

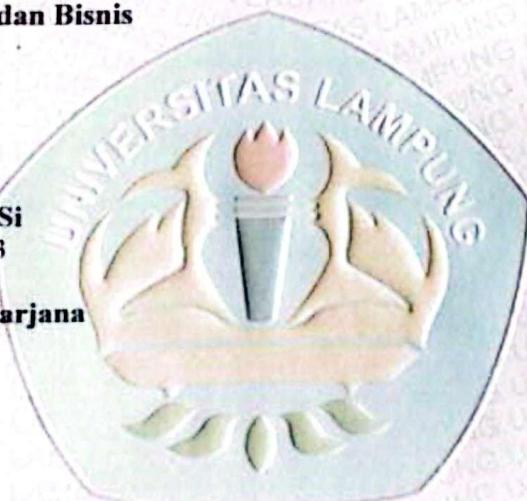
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si**  
NIP 19660621 199003 1 003

**. Direktur Program Pasca Sarjana**

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si**  
NIP 19640326 198902 1 001



**i. Tanggal lulus Ujian Tesis : 18 Juni 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Evi Ratnawati Setyaningsih

NPM : 2221031014

1. Tesis dengan Judul:

**“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan *Fraud Control Plan* Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung”** adalah karya saya sendiri tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme,

2. Hak intelektual atas karya nilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila sikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibatnya dan sanksi yang akan diberikan dan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2025

at Pernyataan



Evi Ratnawati Setyaningsih

NPM. 2221031014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Evi Ratnawati Setyaningsih  
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 11 Oktober 1978  
Nama Ayah : Marina  
Nama Ibu : Sumilah  
Pendidikan :  
1. SD Sokoliman II lulus Tahun 1991  
2. SMPN 1 KarangMojo lulus Tahun 1994  
3. SMA II Wonosari lulus Tahun 1997  
4. Pendidikan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas  
Negri Yogyakarta lulus Tahun 2003  
  
Pekerjaan : Guru Akuntansi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten  
Tulang Bawang, Lampung

## MOTTO

**"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."**

**Surat Al-Baqarah ayat 216**

**“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”**

**Surat At-Taubah ayat 40**

**"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."**

**Surat Al-Insyirah Ayat 6**

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan *Fraud Control Plan* Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga Tesis ini selesai. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada penulis.
4. Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tesis

ini, serta untuk segala ilmu, bantuan dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.

5. Dr. Fajar Gustiawati, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Pengaji utama yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.
6. Dr. Retno Yuni NS, S.E., M.Si., Ak. selaku pengaji yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga penyelesaian tesis ini.
7. Kedua Orang Tua penulis, keluarga dan anak-anakku tercinta (Dhila, Rama, Athar, Ataya) yang telah memberikan semangat dan dukungan selama menyelesaikan perkuliahan sampai selesai.
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Universitas Lampung.
9. Teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini belum sempurna baik dari materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tesis ini. Peneliti berharap, tesis ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Bandar Lampung, Juli 2025  
Penulis,

**Evi Ratnawati Setyaningsih**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>1.5 Keterbaruan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Stewardship .....	10
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan .....	11
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	14
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern.....	15
2.1.5 Pengawasan Internal.....	17
2.1.6 <i>Fraud Control Plan (FCP)</i> .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	24
2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	24
2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	24
2.3.3 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	25
2.3.4 <i>Fraud Control Plan</i> Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	26
2.3.5 <i>Fraud Control Plan</i> Dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	27
2.3.6 <i>Fraud Control Plan</i> Dalam Memoderasi Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	28
2.4 Kerangka Penelitian.....	29

<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Sumber Dan Jenis Data .....	30
3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5 Definisi Operasional Variabel .....	31
3.5.1 Variabel Independen .....	31
3.5.2 Variabel Dependen.....	32
3.5.3 Variabel Moderasi.....	32
3.6 Metode Analisis Data .....	35
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	35
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	35
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	36
3.6.4 Pengujian Hipotesis.....	37
3.7 <i>Pilot Test (Preliminary Research)</i> .....	40
3.7.1 Uji Validitas .....	41
3.7.2. Uji Reliabilitas.....	44
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Analisis Deskriptif.....	45
4.1.2 Uji Kualitas Data.....	58
4.1.3 Uji Asumsi Klasik .....	62
4.1.4 Uji Regresi .....	66
4.1.5 Uji Kelayakan Model (Uji F) .....	67
4.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	68
4.1.7 Uji Hipotesis.....	69
4.2 Pembahasan .....	71
4.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	71
4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	72
4.2.3 Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	74
4.2.4 Pengaruh <i>Fraud Control Plan</i> dalam memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	75
4.2.5 Pengaruh <i>Fraud Control Plan</i> dalam Memoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	77
4.2.6 Pengaruh <i>Fraud Control Plan</i> dalam Memoderasi Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	78
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	82

5.3 Saran .....	82
5.3.1 Saran untuk Pemerintah .....	82
5.3.2 Saran untuk Institusi Pendidikan.....	83
5.3.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya .....	83
5.4 Implikasi Penelitian .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	3
Tabel 2.1 Hasil Maping Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.....	31
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	33
Tabel 3.3 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	41
Tabel 3.4 Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	42
Tabel 3.5 Uji Validitas Pengawasan Intern.....	42
Tabel 3.6 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	43
Tabel 3.7 Uji Validitas <i>Fraud Control Plan</i> .....	43
Tabel 3.8 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Demografi Responden.....	46
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
Tabel 4.3 Jawaban Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	49
Tabel 4.4 Jawaban Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	51
Tabel 4.5 Jawaban Pengawasan Intern.....	53
Tabel 4.6 Jawaban Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	54
Tabel 4.7 <i>Fraud Control Plan</i> .....	56
Tabel 4.8 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	59
Tabel 4.9 Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	59
Tabel 4.10 Uji Validitas Pengawasan Intern .....	60
Tabel 4.11 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	61
Tabel 4.12 Uji Validitas <i>Fraud Control Plan</i> .....	61
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas .....	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	64
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas .....	66
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi .....	66
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) .....	69
Tabel 4.19 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	69
Tabel 4.20 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	68

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	64
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kuesioner penelitian
2. Hasil Pengolahan Data
3. Hasil Asumsi Klasik
4. Hasil Uji Regresi
5. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
7. Hasil Perhitungan Hipotesis

## **BAB I. PENDAHULUAN**

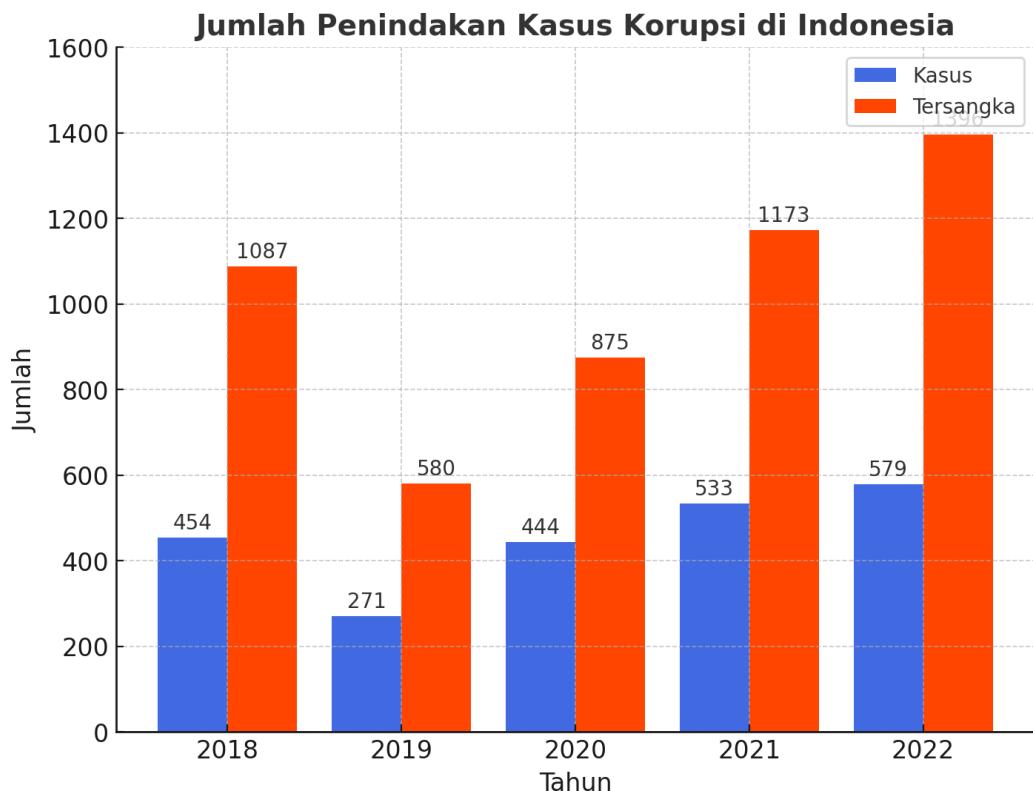
### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini dilakukan berdasarkan masih tingginya masalah tentang kasus korupsi di Indonesia. Dari beberapa fenomena tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih rendah.

Hasil survei *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menerangkan bahwa masih banyak tindakan korupsi di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Menurut indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai (detik.com,2023)

Menurut data ICW terdapat 579 kasus korupsi di Indonesia tahun 2022. Jumlah ini meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Kasus korupsi utilitas di sektor pemerintahan sebanyak 54 kasus dan kasus paling banyak sejumlah 155 kasus terjadi di sektor desa. Masih tingginya kasus korupsi di sektor pemerintahan mengakibatkan kerugian secara keuangan. Korupsi sebagai suatu tindakan kecurangan dapat terjadi dalam laporan keuangan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan berkualitas sangat penting untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang relevan, bisa diandalkan dan dipercaya serta bebas dari penipuan dan kecurangan.

Jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: DataIndonesia.id *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Tahun 2022

**Gambar 1.1 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia**

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 terdapat gambaran hasil pemeriksaan BPK mengenai pertanggungjawaban laporan keuangan dan laporan kinerja. BPK Provinsi Lampung melakukan 27 pemeriksaan yang terdiri dari 16 pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 5 pemeriksaan kinerja dan 6 pemeriksaan atas tujuan tertentu.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 342 temuan terdiri dari 569 permasalahan, meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta 74 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Dari permasalahan di atas menunjukkan adanya permasalahan yang mengakibatkan kerugian, penyimpangan administrasi dan permasalahan lemahnya (SPI) Sistem Pengendalian Internal yang berarti bahwa menurunnya kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Adanya permasalahan ketidakpatuhan dan lemahnya SPI mengindikasikan adanya tindakan kecurangan (*fraud*).

**Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022**

Sumber: IHPD BPK Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Permasalahan	Prosentase Masalah	Jumlah Kerugian
1	Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-Undangan a. Kerugian b. Potensi kerugian c. Kekurangan penerimaan d. Penyimpangan administrasi e. Kelemahan SPI	86,99 % 39,80 % 6,67 % 5,86% 12,53% 35,13%	Rp 90,27 miliar Rp 68,96 miliar Rp 14,39 miliar Rp 6,90 miliar 0,00 0,00
2	Permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan	13,01%	Rp 1,91 miliar

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut BPK Korupsi, seperti mark-up harga, pengadaan barang/jasa fiktif, dan penyalahgunaan anggaran, dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Korupsi sistemik telah merusak persyaratan mendasar tata kelola pemerintahan yang baik, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum (Kuntadi,2023).

Laporan keuangan yang berkualitas masih menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. Namun faktanya terjadi penurunan kualitas laporan keuangan di beberapa tahun terakhir. Hal ini terungkap pada laporan BPK pada IHPD laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Masih ditemukan beberapa tindakan kecurangan, korupsi, lemahnya tata kelola yaitu permasalahan ketidakpatuhan, lemahnya (SPI) Sistem Pengendalian Internal dan masalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan pada IHPD laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* pada beberapa penelitian terdahulu. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Roreng dkk, 2021). Kolit dkk (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun Alminanda (2018) dan Arifudin (2019) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Widaryani dkk (2020), Rahmawati dkk (2022), dan Alminanda (2018) menyatakan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Omoregio (2020) menemukan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Wonar (2018) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Manik (2020) menemukan bahwa pencegahan *fraud* akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Indriani (2021) menemukan bahwa pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan *fraud*. Pencapaian laporan keuangan yang berkualitas dapat terhambat dengan adanya risiko terjadinya *fraud*. Untuk mengurangi risiko *fraud* tersebut perlu melibatkan upaya pendektsian dan pencegahan (Jans et al., 2010).

Adanya perbedaan dari hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa masih adanya research gap penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan *fraud* sebagai variabel moderasi. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah salah satunya yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan intern. Namun faktor-faktor tersebut apakah menjadi lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila dengan adanya variabel

moderasi, yaitu *Fraud Control Plan* (FCP). Pencegahan *fraud* dengan *Fraud Control Plan* memberi pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya semakin berhasil *Fraud Control Plan* maka kualitas laporan keuangan daerah semakin meningkat.

Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Bagjana (2021) dengan menambahkan variabel pengawasan internal dan menambahkan variabel moderasi FCP. Alminanda (2018) dengan mengubah variabel moderasi komitmen organisasi menjadi FCP dan merubah variabel independent pemanfaatan teknologi dengan pengawasan internal. Manik (2020) dengan menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan menjadikan FCP sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian tersebut perlu untuk dilakukan pengembangan populasi penelitian ke tingkat provinsi.

Penelitian ini menambahkan variabel *Fraud Control Plan* sebagai pemoderasi. FCP menurut BPKP membantu menciptakan budaya organisasi yang anti-korupsi, meningkatkan kapabilitas pengelolaan risiko *fraud*, serta membangun sistem bagi pegawai untuk mencegah kecurangan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, ada 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah berkualitas yaitu; andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Menurut IASB (2010), dua karakteristik kualitatif utama informasi dalam laporan keuangan adalah relevansi dan representasi yang akurat. Relevansi berarti bahwa informasi memiliki nilai prediktif atau konfirmatif. Artinya, informasi membantu pengguna untuk memprediksi hasil di masa mendatang, misalnya laba di masa mendatang, atau dapat mengonfirmasi atau membantah prediksi sebelumnya. Representasi yang akurat berarti penggambaran yang lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Oleh karena itu laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang sesuai dan benar dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak ada penyimpangan laporan keuangan, atau tindakan kecurangan (*fraud*).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan internal dan kualitas laporan keuangan. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pengaruh SDM, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan dimoderasi oleh *Fraud Control Plan*.

Menurut Manik dan Kusasi (2019) dan Noholo (2021) menerangkan bahwa *Fraud Control Plan* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Tagora dan Putriana (2022), manajemen perlu merancang dan menerapkan strategi pencegahan *fraud* dan menyusun kebijakan anti-*fraud* melalui *Fraud Control Plan*. Tindakan manajemen untuk mencegah kecurangan merupakan perilaku yang didasari oleh niat manajemen untuk menerapkan *Fraud Control Plan* untuk mencegah terjadinya kecurangan, Suhendro dan Sembiring (2023).

BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah memperoleh mandat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan *fraud* didasarkan pada teori dan penelitian yang ada. *Fraud Control Plan* yang dikemukakan oleh BPKP tahun 2017 lebih mudah diadaptasikan karena lebih dekat dengan pengawasnya sehingga dapat dikendalikan dalam praktiknya. Melakukan *Fraud Control Plan* lebih dini dinilai lebih efektif dan efisien dari pada tindakan *represif*. Fungsi utama *Fraud Control Plan* menurut BPKP adalah sebagai strategi pengendalian kecurangan yang komprehensif, yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian yang mengindikasikan adanya kecurangan di dalam suatu organisasi.

Upaya pencegahan dengan *Fraud Control Plan* dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar dan reputasi organisasi dan individu yang rusak. Sehingga penulis tertarik memasukkan variabel *Fraud Control Plan* sebagai variabel moderasi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut beberapa fenomena di atas penulis ingin membuat penelitian yang berkaitan dengan “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

dengan *Fraud Control Plan* Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah *Fraud Control Plan* dapat memoderasi pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan?
5. Apakah *fraud control plan* dapat memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan?
6. Apakah *Fraud Control Plan* dapat memoderasi pengaruh antara pengawasan internal dengan kualitas laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Adapun tujuan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Menganalisis pengaruh *Fraud Control Plan* terhadap hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan.
5. Menganalisis pengaruh *Fraud Control Plan* terhadap hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan.

6. Mengidentifikasi pengaruh *fraud control plan* terhadap hubungan antara pengawasan internal dengan kualitas laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat yakni:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengkonfirmasi dan memperkaya teori stewardship. Menjelaskan secara literatur dan pengetahuan mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan internal, terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan *Fraud Control Plan* sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.

##### **1.4.2 Manfaat Empiris**

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan internal, terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan *Fraud Control Plan* sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.

##### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak pemerintah daerah/kota untuk mengevaluasi laporan keuangan dan menjadi masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh lembaga pemerintah, lembaga internasional, maupun lembaga publik lainnya dalam mengelola meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan internal pemerintahan, pengawasan internal dan *Fraud Control Plan* guna mencapai kesejahteraan rakyat dengan mengurangi dan mencegah tindak korupsi.

## 1.5 Keterbaruan Penelitian

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel moderasi *Fraud Control Plan* termasuk belum dilakukan dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adanya variabel *Fraud Control Plan* sebagai variabel moderasi apakah memperkuat atau memperlemah variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan berkembang dari penelitian sebelumnya Manik (2019) tetapi juga dengan menambah variasi metode yang memungkinkan menggunakan Google Form dalam mengumpulkan data. Roreng (2021) dengan menambahkan variabel SPI dan pengawasan internal. Alminanda(2018) dengan mengganti variabel moderasi komitmen organisasi menjadi FCP dan merubah variabel pemanfaatan teknologi dengan pengawasan internal. Rahmawati (2022) dengan menambahkan variabel SPI, pengawasan intern, dan menambah variabel moderasi *Fraud Control Plan*.
3. Populasi penelitian adalah pegawai SKPD berkembang dari penelitian sebelumnya Rahmawati (2022) dan Roreng (2021) dengan menambahkan pengembangan populasi penelitian ke tingkat provinsi.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Stewardship**

Teori *stewardship* pertama kali dicetuskan oleh Davis dan Donaldson (1991). Teori *stewardship* memiliki akar psikologis yang dirancang untuk menjelaskan ketika manajer sebagai *steward* bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori ini digambarkan situasi ketika para manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama yaitu kepentingan organisasi. Pendapat penting dari *stewardship* yaitu manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik, tetapi demikian bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan hidup (Raharjo, 2007).

Teori *stewardship* merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait di dalamnya. Konsep kebersamaan (*collectivity*), kemitraan, pemberdayaan (*empowerment*), dan saling percaya serta pelayanan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dalam pendekatan ini. Membentuk sikap yang mengarahkan pada teori *stewardship* sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan organisasi diharapkan dapat mengatasi isu-isu yang berhubungan dengan *corporate governance* dan *good corporate governance* (Rahman, 2001).

*Stewardship* merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi. Bagaimana cara membentuk suatu perilaku di mana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi mereka dapat lebih bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang berlaku sekarang yaitu dari konsep mengendalikan dan mengarahkan. Ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan bersama oleh anggota/tim dalam organisasi. Teori organisasi dan kebijakan perusahaan dalam perspektif teori agensi

yaitu; berorientasi, control, jangka pendek, individualisme, rentang kekuasaan yang tinggi, komitmen rendah dan sebagainya akan bergeser pada *Good Corporate Governance* dalam perspektif teori *stewardship* yang mengarah pada informasi, transparansi, akuntabilitas, dan aspek-aspek yang bersifat kolektifitas/kebersamaan, kemitraan dan pemberdayaan, bersifat jangka panjang, peningkatan kinerja, kepercayaan, rentang kekuasaan rendah (Donaldson dan Davis, Schoorman, 1997).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Teori *Stewardship* dalam penerapannya di organisasi *nonprofit* dan sektor publik seperti organisasi pemerintahan lainnya akan bermanfaat bagi beberapa pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut. Beberapa pihak dapat memanfaatkan LKPD untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi (Thorton, 2009).

Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai manajer mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah harus memberikan informasi yang terperinci, relevan dan dapat dipercaya dalam pembuatan LKPD. Dalam teori *stewardship* hubungan kinerja pegawai masing-masing individu termotivasi oleh tujuan organisasi dan bukan tujuan pribadi.

### **2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan menggambarkan kesesuaian informasi keuangan yang dilaporkan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan bila informasi yang terkandung di dalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa kini dan masa lalu, dan dapat memprediksi masa depan, serta mengoreksi atau menegaskan hasil evaluasi mereka di masa lalu. Sehingga, yang dimaksud informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna dalam mengoreksi atau menegaskan ekspektasi mereka di masa lalu.
- (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi membantu pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang atas hasil masa lalu dan kejadian saat ini.
- (c) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga berguna dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan dapat diasumsikan relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa kini atau masa lalu dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu serta memprediksi masa depan.

b. Andal

Informasi yang terdapat pada laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan pengertian yang menyesatkan, dapat diverifikasi serta menyajikan fakta secara jujur. Apabila informasi relevan, tetapi penyajiannya atau hakikatnya tidak bisa diandalkan maka dapat secara potensial menyesatkan penggunaan informasi tersebut. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- (a) Penyajian Jujur: Informasi mendeskripsikan secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar.

(b) Dapat diverifikasi (*verifiability*): Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji, dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda.

(c) Netralitas Informasi tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu dan diarahkan untuk kebutuhan umum.

c. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya atau laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dilakukan secara eksternal dan internal dan eksternal. Perbandingan eksternal dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan mempunyai kebijakan akuntansi yang sama. Perbandingan internal dilakukan apabila suatu entitas dari tahun ke tahun menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, maka perubahan yang terjadi diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Dapat dipahami artinya informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam istilah serta bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Menurut IASB (2010), dua karakteristik kualitatif utama informasi dalam laporan keuangan adalah relevansi dan representasi yang akurat. Informasi dalam laporan keuangan relevan jika berhasil menciptakan perbedaan dalam keputusan pengguna laporan keuangan. Representasi yang tepat berarti bahwa informasi menghasilkan sensasi ekonomi dunia nyata yang ingin direpresentasikan. Relevansi dan representasi yang akurat membuat laporan keuangan nyaman bagi pengguna. Ada juga beberapa karakteristik kualitatif tambahan, yang mendukung fitur mendasar: keterbandingan, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan pemahaman. Meningkatkan karakteristik kualitatif membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang

berguna. Mereka meningkatkan kegunaan pengambilan keputusan atas informasi pelaporan keuangan yang relevan dan disajikan dengan tepat.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Yendrawati (2013), pengertian kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan individu atau seseorang dalam suatu kelembagaan (organisasi) atau suatu sistem dalam melaksanakan kewenangannya atau fungsi-fungsi dalam mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menurut Ndaraoh (1999), adalah sumber daya manusia yang menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai generatif-kompetitif-inovatif dengan energi seperti: *creativity*, *intelligence* dan *imagination*; tidak menggunakan energi kasar, seperti lahan air, bahan mentah, otot, tenaga, dan sebagainya.

Davis dan Werther (1996), menyatakan sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, siaga dan mampu mencapai berbagai tujuan organisasi. Dimensi pokok sisi sumber daya yaitu kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok pada manusia yaitu perlakuan kontribusi terhadapnya dan menentukan kapabilitas dan kualitas hidupnya. Menurut Griffin (2004), indikator kapasitas sumber daya manusia diukur melalui:

#### **1) Pendidikan**

Pendidikan adalah kegiatan yang universal pada kehidupan manusia. Pendidikan merupakan proses sistematis yang mengubah tingkah laku pada seseorang dalam mencapai tujuan organisasi.

Jalur pendidikan yang dimaksud adalah:

- (a) pendidikan nonformal,
- (b) pendidikan informal,
- (c) pendidikan formal.

## 2) Pelatihan

Pelatihan yang baik berkaitan dengan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang dimaksud pelatihan yaitu usaha dalam memperbaiki performa pekerja di suatu pekerjaan tertentu yang telah menjadi tanggungjawabnya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

## 3) Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang dalam bekerja. Seseorang yang berpengalaman sudah terbiasa melakukan pekerjaan dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan serta berwawasan yang luas (Deviani, Fajar dan Delanno, 2013). Kasanuddin (2011) mengatakan bahwa indikator dari kapasitas sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

- a) Kualitas intelektual meliputi pengetahuan dan keterampilan,
- b) Pendidikan,
- c) Memahami bidangnya,
- d) Kemampuan,
- e) Semangat kerja dan
- f) Kemampuan perencanaan pengorganisasian.

### **2.1.4 Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian internal mempunyai peranan penting untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan. PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern yaitu proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan terus menerus oleh seluruh pegawai dan pimpinan dalam memberikan keyakinan memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008

- a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

dalam memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang undangan dan pengamanan aset negara.

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP, merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

c. Pengawasan intern yaitu semua proses kegiatan *review*, audit, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain pada fungsi organisasi dan penyelenggaraan tugas dalam rangka memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah UU No. 60 Tahun 2008 Umum SPIP terdiri dari:

a. Lingkungan Pengendalian;

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, prosedur dan kebijakan yang mencerminkan sikap pimpinan lembaga atau instansi mengenai pengendalian intern yang mampu menimbulkan kesadaran semua pegawai tentang pentingnya pengendalian bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan.

b. Penilaian Risiko;

Penelaian risiko yaitu analisis risiko dan identifikasi risiko. Hal ini dilaksanakan guna menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

c. Kegiatan Pengendalian;

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan

pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

d. Informasi dan Komunikasi;

Informasi harus dilaporkan dan dicatat untuk pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu sarana dan bentuk tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dan pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan harus mampu menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil review dan audit lainnya untuk segera ditindaklanjuti (PP Nomor 60 Tahun 2008). Pengendalian internal adalah suatu cara dalam mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya organisasi, serta berperan penting untuk pendektsian penggelapan atau *fraud* dan tindakan pencegahan.

### **2.1.5 Pengawasan Internal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 dalam pasal 48 menerangkan bahwa pengawasan intern dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP melaksanakan pengawasan intern dengan a. Audit b. Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan dan e. Aktivitas pengendalian yang berbeda. Aparat pengawasan intern pemerintah seperti dikemukakan pada Pasal 48 ayat (1) terdiri atas a. BPKP, b. Inspektorat Jenderal dengan sebutan beda serta menurut efisiensi menjalankan pengendalian intern c. Inspektorat Kabupaten/Kota dan d. Inspektorat Provinsi;. Pengawasan internal membantu pemerintah untuk mematuhi hukum dan peraturan, dan mencegah penipuan. Pengawasan internal dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa anggaran dipatuhi, kebijakan dipatuhi, kekurangan modal teridentifikasi, dan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengawasan intern bertujuan untuk mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN serta good governance. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

### **2.1.6 *Fraud Control Plan* (FCP)**

Banyaknya kasus kecurangan (*fraud*), maka dibutuhkan pencegahan kecurangan laporan keuangan. Dengan adanya variabel *Fraud Control Plan* memungkinkan penambahan kualitas laporan keuangan karena faktor-faktor terjadinya *fraud* sudah ditanggulangi lebih awal. Pencegahan tersebut dilaksanakan oleh pimpinan, manajemen dan semua karyawan yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan, Cara yang sering dilakukan dalam mencegah kecurangan adalah dengan mendeteksi sebab-sebab terjadinya *fraud* dan mengantisipasi gejala tersebut sebelum terjadi. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menetapkan kebijakan, system dan prosedur yang menyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan manajemen, dewan komisaris, dan personil lain perusahaan dalam memberi keyakinan memadai untuk mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (COSO:1992). *Fraud Control Plan* (FCP) adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri atas atribut- atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi (BPKP, 2017). BPKP (2017), menyebutkan bahwa FCP terdapat 10 (sepuluh) atribut pengendalian yang terdiri dari standar perilaku dan disiplin, kebijakan anti-*fraud*, manajemen risiko *fraud*, struktur pertanggungjawaban, kepedulian pegawai, sistem pelaporan *fraud*, perlindungan pelapor, kepedulian pelanggan dan masyarakat, prosedur investigasi, dan pengungkapan kepada pihak eksternal. Menurut Noholo (2021), *Fraud Control Plan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Chairunnisa

(2019) menyebutkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja anti-*fraud* diantaranya menjadikan kejujuran sebagai budaya utama perusahaan, penandatanganan pakta integritas oleh karyawan dan pelanggan serta memproses seluruh kasus *fraud* yang teridentifikasi secara independen dengan menugaskan investigasi kepada Satuan Audit Internal Perusahaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dari penelitian yang dilakukan Nosa AE Omoregio (2020), menemukan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Roreng (2021), Bawono (2021), Rahmawati (2022), Kolit (2023), Bagjana (2021). dan Lestari (2020), dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Alminanda (2018), dan Arifuddin (2019), menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif.

Menurut Rahmawati (2022), Alminanda (2018), Bawono (2021), Widaryani (2020), Bagjana (2021), dan Lestari (2020), Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan. Menurut Maria (2019), menemukan faktor kesempatan memengaruhi probabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah Indonesia. Sedangkan hasil penelitian Tagora (2022), menemukan bahwa RSUD XYZ telah merancang dan menerapkan strategi pencegahan melalui pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk penanganan *fraud* dan menyusun kebijakan anti-*fraud*. Tingkat pemenuhan atribut FCP terhadap kebijakan tersebut masih belum memadai karena terdapat beberapa atribut pengendalian yang belum diimplementasikan karena teknis pelaksanaan dari atribut-atribut tersebut belum ditetapkan. *Fraud Control Plan* dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian-penelitian terdahulu yang tersebut di atas tentang topik yang berkaitan dengan penelitian ini tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Hasil Maping Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Sampel Penelitian	Keterbatasan	Hasil Penelitian
1	Faktors Affecting Financial Reporting Quality In Nigeria Public Sector, Nosa A.E Omorogie; Usifo, John Eromosele, International journal of social Science and economic research (2020)Q2	Variabel independent: Pengendalian Internal, Efektivitas Komite, Akuntan Publik, Hukuman yang ketat atas pelanggaran IPSAS Variabel dependen; Kualitas Laporan Keuangan	Teknik analisis regresi uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS.	150 salinan kuesioner dengan menggunakan skala linkert. Sampel penelitian, Pegawai negri, anggota organisasi masyarakat sipil, praktisi hukum, akademisi, dan akuntan profesional di kantor auditor jenderal federasi.	Direkomendasikan agar pengaturan akuntansi sector public di Nigeria harus mencakup mekanisme pengendalian internal yang efisien dan efektif. Komite Akuntan publik yang fungsional dan penggabungan prasyarat IPSAS dalam kerangka pelaporan laporan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian mempunyai hubungan negatif yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan</li> <li>2. Efektivitas komite akuntan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan.</li> <li>3. Hukuman yang ketat atas pelanggaran keuangan memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</li> <li>4. Penerapan IPSAS mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</li> </ol>
2	Competency Analysis of Human Resources and the Use of Information Technology on the Quality of Financial Reports in the Local Government of the City Of Makassar, Petrus Peleng Roreng, Mira Bandhaso, Christina Jeane Tandirung (2021) WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS,Q2	Variabel independen: Kompetensi SDM, Tekhnology informasi Variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan	Metode statistik dengan analisis regresi berganda	26 (SKPD) satuan kerja perangkat daerah Kota Makassar.	Populasi penelitian hanya satu kota saja yaitu Kota Makassar. Sehingga hasil penelitian ini kurang kuat dalam generalisasi. Sehingga perlu melakukan studi serupa di berbagai Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau memperluas subjek penelitian di tingkat Provinsi. Penelitian selanjutnya dapat menambah moderasi & menambahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.	Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikasi semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia satuan kerja daerah terhadap pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik dalam menghasilkan daerah yang berkualitas. laporan keuangan pemerintah yang berlaku di Kota Makassar.
3	Mekanisme dan Implementasi <i>Fraud Control Plan</i> : Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Alharis Tagora, Vima Tista Putriana,	Variabel Independen; Mekanisme yang ditrancang dan diterapkan RSUD, Analisis berbagai atribut FCP Variabel depeden;	Penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus	Subjek penelitian adalah RSUD XYZ. Pemilihan ini dilakukan karena RSUD XYZ bergerak dalam bidang kesehatan yang rawan terjadi <i>fraud</i> . Berdasarkan laporan hasil	Penelitian ini belum menilai seberapa efektif instrumen FCP dapat mencegah terjadinya <i>fraud</i> . Oleh karena itu, saran riset untuk penelitian selanjutnya	RSUD XYZ telah merancang dan menerapkan strategi pencegahan melalui pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk penanganan <i>Fraud</i> dan penyusunan kebijakan anti <i>Fraud</i> . Tingkat pemenuhan atribut FCP terhadap kebijakan tersebut masih belum memadai karena terdapat beberapa atribut pengendalian yang

	<i>Indonesia Treasury Review (2022) Sinta 2</i>	<i>Fraus Control Plan</i>		pemeriksaan BPK tahun 2017 s.d. 2020. ditemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan pada RSUD XYZ yang akan meningkatkan potensi terjadinya <i>fraud</i> .	adalah melakukan analisis mengenai tingkat efektivitas penerapan FCP dalam upaya pencegahan <i>fraud</i> .	belum diimplementasikan karena teknis pelaksanaan dari atribut-atribut tersebut belum ditetapkan.
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan kualitas Laporan keuangan Pemerintah daerah: Peran sistem Pengendalian Intern sebagai Pemediasi. Evi Rahmawati, sari sonita, Arif Wahyu Nurkholid, Hafieez Sofyani. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan. (2022) Sinta 2	Variabel independen: Kompetensi SDM Variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Variabel Mediasi Sistem Pengendalian Internal	Analisis data menggunakan strctural equation model (SEM) dengan menggunakan regresi partial least square (PLS).	Responden penelitian ini terdiri dari 15 Dinas pada bagian keuangan.,	Lingkup penelitian hanya satu kota saja yaitu Kota Yogyakarta. Sehingga hasil penelitian ini kurang kuat dalam hal generalisasi. Maka peneliti menyarankan agar melakukan studi serupa di berbagai Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau memperluas subjek penelitian di tingkat Provinsi. Penelitian selanjutnya dapat menambah moderasi serta menambahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi SDM dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah harus menjaga dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan Pendidikan. Sehingga SPI akan terdorong, dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
5	Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Putri Alminanda, Marfuah, 2018, Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Sinta 2)	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Moderasi: Komitmen Organisasi	Analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA)	Seluruh pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan di SKPD Kabupaten Bantul, terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan, Akuntan (pembukuan), dan Bendahara	Lokasi penelitian terbatas pada SKPD Kabupaten Bantul. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian ke seluruh SKPD di Provinsi Yogyakarta agar kontribusinya lebih signifikan dalam organisasi sektor publik.	1. SPI dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Komitmen organisasi memperkuat SPI dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6	Menilai Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Icuk Rangga Bawono, Agus Saroso, Gema Puja Yuniarso, 2021,	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Variabel Dependen:	Analisis regresi linier berganda	Seluruh satuan kerja pegawai pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntansi (SIMDA)	Wilayah penelitian hanya di Sulawesi Tengah sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain tanpa pertimbangan lebih lanjut.	Kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

	AKRUAL: Jurnal Akuntansi, Sinta 2)	Kualitas Informasi Laporan Keuangan				
7	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Heylmi Umi Widaryani, Kiswanto, 2020, Jurnal Analisis Akuntansi, Sinta 2)	Variabel Independen: Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), Komitmen Organisasi Variabel Depend: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Mediasi: Efektivitas SPI, Komitmen Organisasi	Structural Equation Model (SEM) menggunakan SmartPLS	Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di 51 OPD Kabupaten Kluren, dengan total 102 responden (kepala bagian keuangan dan staf keuangan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun)	Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak menggunakan variabel intervening komitmen organisasi, karena hasil menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memediasi pengaruh efektivitas SAKD terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak direkomendasikan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke daerah lain.	1. Efektivitas SAKD dan efektivitas SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Efektivitas SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SPI. 4. Efektivitas SAKD dan efektivitas SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi.
8	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Agus Sutanto, 2020, Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Sinta 2)	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Variabel Depend: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis regresi berganda	Pegawai akuntansi dan keuangan di OPD Provinsi Jawa Tengah, dengan 95 responden	Sampel terbatas pada satu provinsi dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.	1. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
9	Dampak Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dian Pratiwi, 2021, Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi, Sinta 2)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Variabel Depend: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis regresi linier sederhana	Pegawai bagian keuangan di 40 OPD Kabupaten Sleman, dengan 80 responden	Tidak mempertimbangkan faktor lain seperti budaya organisasi atau kebijakan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.	Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
10	Pengaruh Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi (Indah Sari, 2021, Jurnal Akuntansi Keuangan Publik, Sinta 2)	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Depend: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Moderasi: Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Analisis regresi moderasi (MRA)	Pegawai keuangan di OPD Kota Bandung, dengan total 120 responden	Hanya mengkaji satu kota dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal lainnya yang mungkin berpengaruh.	1. Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Efektivitas sistem pengendalian intern memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. 3. Efektivitas sistem pengendalian intern tidak memperkuat hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan.

11	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Siti Rahayu, 2020, Jurnal Keuangan Daerah, Sinta 2)	Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis regresi berganda	Pegawai bagian keuangan di OPD Provinsi Jawa Barat, dengan 105 responden	Fokus hanya pada tiga variabel tanpa mempertimbangkan faktor teknologi atau regulasi yang mungkin berpengaruh.	1. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
12	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Taufik Hidayat, 2021, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Sinta 2)	Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Moderasi: Komitmen Organisasi	Analisis regresi moderasi (MRA)	Pegawai keuangan di 50 OPD Kota Surabaya, dengan 115 responden	Hanya meneliti satu kota dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal lainnya.	1. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Komitmen organisasi memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. 3. Komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.
13	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Indra Firmansyah Bagjana, Andry Arfian Rachman, 2021), jurnal ASET: Akuntansi Riset, Sinta 2	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menggunakan model regresi linier berganda dan uji t untuk menguji hipotesis yang diolah dengan SPSS Statistics 25.	83 orang yang merupakan tim penyusun laporan keuangan SKPD	Disarankan untuk meneliti variable lain, misalnya Audit Internal teknologi Informasi, Komitmen organisasi, Kepemimpinan dll.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan *stewardship theory* menjelaskan dua hal penting yaitu pemerintah (*steward*) sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh masyarakat (pemilik) untuk menjalankan kewajibannya semaksimal mungkin. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pemegang amanah masyarakat dituntut mampu menjadi tenaga kerja yang baik dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

Kolit (2023), menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Astari (2018), menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Lestari (2020), menemukan bahwa penerapan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

### 2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional instansi pemerintahan. Melalui audit dan evaluasi, SPI memastikan bahwa informasi yang relevan dan akurat tersedia untuk manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah sebagai *steward* penting untuk menjaga kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah diharapkan mampu mengendalikan secara langsung tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral atas kegiatan

dan tindakan yang dilakukan terus menerus oleh seluruh pegawai dan pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset, keandalan pelaporan keuangan. SPI bermanfaat untuk: (a) memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan instansi menjadi ekonomis, efisien dan efektif, (b) mendeteksi adanya kesalahan (mismanagement) dan *fraud* dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, (c) membantu pengamanan aset terkait terjadinya *fraud*.

Pakpahan dkk(2022), menyatakan bahwa kualitas sistem pengendalian intern dan kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lestari (2020), menemukan bahwa sistem manajemen intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indriani (2021), menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap *Fraud Control Plan*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

### **2.3.3 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pengawasan intern bertujuan untuk mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN serta *good governance*. Menurut teori *stewardship* di mana pemerintah diamanahkan untuk taat terhadap perintah atau aturan dan tata kelola yang baik untuk kepentingan masyarakat (pemilik). Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Menurut Winardi (2001), pengawasan yaitu semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer sebagai upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan internal merupakan kebijakan dari prosedur spesifikasi yang dirancang dalam memberikan keyakinan memadai bagi manajemen bahwa tujuan dan sasaran penting bagi manajemen perusahaan dapat

dipenuhi. Pengawasan internal sangat penting dalam perkembangan operasi perusahaan, karena masalah-masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan demikian, diperlukan suatu pengawasan internal yang baik dan memadai. Menurut Amriani (2018), pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah. Ponamon (2014), pengawasan internal dan pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh dan searah/positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

#### **2.3.4 *Fraud Control Plan* Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai disebut kompetensi sumber daya manusia. Menurut *stewardship theory* sumber daya manusia dalam pemerintahan diharapkan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan *Fraud Control Plan* diharapkan meminimalisir penyimpangan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia harus mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang tertuang dalam PP No.71 tahun 2010 yaitu; relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang relevan dengan pekerjaan. *Fraud Control Plan* diharapkan mampu mempengaruhi sumber daya manusia dalam memaksimalkan kualitas laporan keuangan. Menurut McClelland dalam Rivai (2011) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung untuk mencapai target kinerja dengan menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasilhasil (outcomes) yang berkualitas. Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), kemampuan (*abilities*), sikap (*attitude*), dan perilaku adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas manusia dalam menentukan

keberhasilan suatu organisasi, menurut Sunyoto (2012), kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, Wonar (2018). Kompetensi apatur desa berpengaruh terhadap *Fraud Control Plan*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: *Fraud Control Plan* mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

### **2.3.5 *Fraud Control Plan* Dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sejalan dengan teori stewardship, pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di organisasi sektor publik ketika pemerintah memiliki tujuan bersama (Donaldson & Davis, 1991). Dengan *Fraud Control Plan*, SPI dapat dilaksanakan lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk membantu pemerintah untuk menghasilkan informasi akuntansi yang baik dibutuhkan teknologi informasi yang memadai.

*Fraud* juga terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang sehingga untuk mencegah peluang tersebut diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Sehingga *Fraud Control Plan* diharapkan mampu memoderasi sistem pengendalian internal dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Lestari (2020), menemukan bahwa sistem manajemen intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indriani (2021), menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap *Fraud Control Plan*. Sedangkan menurut Manik & Kusasi bahwa variabel pencegahan kecurangan sebagai pemoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: *Fraud Control Plan* mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

### **2.3.6 *Fraud Control Plan* Dalam Memoderasi Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

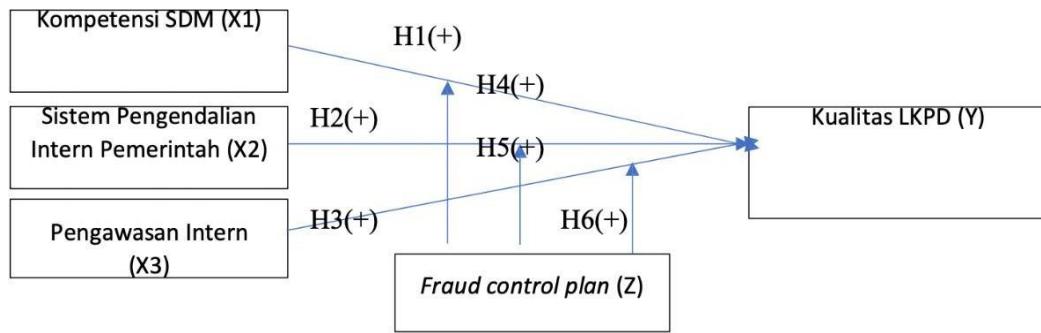
*Fraud Control Plan* seiring dengan *stewardship theory* diharapkan mampu memaksimalkan kerja pemerintah dalam pengawasan internal demi terwujudnya kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini *stewardship theory* diterapkan dapat memaksimalkan kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan internal. Dengan adanya variabel *Fraud Control Plan* memungkinkan penambahan kualitas laporan keuangan karena faktor-faktor terjadinya *fraud* sudah dilaksanakan lebih awal.

Pengawas internal dalam menyelesaikan tugasnya mesti memiliki kompetensi dalam melakukan audit agar kesimpulan dan rekomendasi yang akan diambilnya telah sesuai dengan standar dalam suatu organisasi tersebut. Menurut Boynton (Rohman, 2007) fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Risiko korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah maupun korporasi negara dan daerah belum terkelola dengan baik, karena inefektivitas pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh rendahnya integritas individu dan lemahnya pengendalian intern serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar institusi pengelola risiko korupsi di Indonesia (Harahap dkk, 2018). Data empiris menunjukkan bahwa yang paling banyak dikaitkan dengan korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Indriani (2020), Pencegahan *fraud* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6: *Fraud Control Plan* mampu memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan

## 2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis pada penelitian ini, dapat dirancang suatu kerangka penelitian untuk menggambarkan hubungan atau kaitan antara variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini. Kerangka penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan pengawasan internal (X3). Dengan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y1), serta variabel yang memoderasi yaitu *Fraud Control Plan* (Z).

## **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan pengawasan internal terhadap variabel dependen. Penelitian asosiatif kausal menguji hubungan sebab akibat antara variabel satu dengan yang lainnya. Sementara penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan, menampilkan, dan mengolah data dalam bentuk statistik seperti angka, kurva, atau diagram. Penelitian ini dilakukan secara survei terhadap pegawai bagian akuntansi dan pelaporan pada BPKAD Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.

### **3.2 Sumber Dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer. Data tersebut langsung dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Teknik penelitian ini berupa pertanyaan penelitian dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner.

### **3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi dan pelaporan pada BPKAD Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. Sampel yang diambil adalah pegawai yang bertugas di bagian akuntansi di BPKAD Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung yang memiliki tugas pokok fungsi dan tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling* (kriteria yang dikehendaki) agar mendapatkan data yang representatif dan relevan dengan penelitian. Kriteria pemilihan sampel yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai yang bertugas di bagian akuntansi pada BPKAD Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.
2. Lama bekerja di bagian akuntansi minimal 1 (satu) tahun.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu metode untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sebuah kuesioner diberikan kepada pegawai Pemerintah Provinsi Lampung pada bidang keuangan yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan mengenai sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Semua responden diminta untuk menjawab kuesioner secara jujur dan akurat karena jawaban mereka akan mempengaruhi hasil penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan. Di mana pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan pemanfaatan kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, pengawasan internal dan laporan keuangan dan *Fraud Control Plan*. Bentuk pernyataan kuesioner adalah positif dan negatif. Dalam penelitian ini, variabel independen variabel dependen, dan variabel moderasi diukur menggunakan skala likert, yang memiliki lima poin untuk setiap indikator. Berikut ini adalah penjelasan tentang rentang skala likert yang digunakan:

**Tabel 3.1 Pengukuran Variabel**

Variabel Independen dan Variabel Dependental	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

#### 3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah; kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem pengendalian internal (X2) dan pengawasan internal (X3).

Variabel Independen (X) Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Sugiyono (2019), menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

a. Kompetensi sumber daya manusia (X1).

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efisien dan efektif membantu terwujudnya tujuan masyarakat, karyawan dan perusahaan (Hasibuan 2016).

b. Sistem Pengendalian Internal (X2)

Menurut PP No 60 Tahun 2008 SPI merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus seluruh pegawai dan pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

c. Pengawasan Intern (X2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 pasal 48 menerangkan bahwa pengawasan internal dijalankan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

### **3.5.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y).

Menurut (Sugiyono, 2012), variabel dependen sering disebut sebagai variabel kriteria, output, variabel terikat atau konsekuensi. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

### **3.5.3 Variabel Moderasi**

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Fraud Control Plan (Z)*.

Variabel moderasi menurut Sugiyono (2016) adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah variabel tertentu (variabel moderasi) dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Adapun operasional variabel penelitian akan dirinci pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	Definisi Operasional	Indikator	Skala	Sumber
1	Kompetensi sumber daya manusia (X1) adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efisien dan efektif membantu terwujudnya tujuan masyarakat, karyawan dan perusahaan (Hasibuan 2016). Wether dan Davis (1996), menyatakan bahwa SDM yaitu pegawai yang siap siaga dan mampu dalam mencapain tujuan-tujuan organisasi.	1. Latar belakang Pendidikan (1,2,3) 2. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan (4,5) 3. Memahami prosedur dan proses akuntansi (6,7,8,9) 4. Pelatihan yang teratur (10,11,12)	Ordinal Likert 1-5	Bagjana, I.F. (2021)
2	Sistem Pengendalian Internal (X2) Menurut PP No 60 Tahun 2008 SPI merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus seluruh pegawai dan pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Lingkungan pengendalian (1,2,3,4) 2. Aktivitas pengendalian(5,6) 3. Penilaian risiko (7,8,9,10) 4. Informasi dan komunikasi (11,12) 5. Pemantauan(13,14)	Ordinal Likert 1-5	Alminanda, P. (2018)
3	Pengawasan Internal (X3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 pasal 48 menerangkan bahwa pengawasan internal dijalankan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP melaksanakan pengawasan intern dengan audit, review, evaluasi, pemantauan dan aktivitas pengendalian yang berbeda.	1. Audit (1,2) 2. Review (3,5) 3. Evaluasi (5,6) 4. Pemantauan (7,8) 5. Aktivitas pengendalian (9,10)	Ordinal Likert 1-5	PP No. 60 tahun 2008 dan Amriani (2018)
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y) Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat empat prasyarat normatif agar pemerintah dapat memenuhi kriteria yang dikehendaki.	1. Relevan (1,2,3) 2. Andal (4,5,6) 3. Dapat dibandingkan (7,8,9) 4. Dapat dipahami (10,11,12) Kuesioner	Ordinal Likert 1-5	Alminanda, P. (2018)
5	<i>Fraud Control Plan (FCP)</i> (Z) FCP adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi dan memudahkan pengungkapan kasus penyiangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri atas atribut-atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola organisasi (BPKP, 2017)	1. Standar prilaku dan disiplin (1,2,3) 2. Kebijakan anti- <i>fraud</i> (4,5,6) 3. Manajemen risiko <i>fraud</i> (7,8,9) 4. Struktur pertanggungjawaban (10,11,12) 5. Kepedulian pegawai (13,14,15) 6. Sistem pelaporan <i>fraud</i> (16,17,18) 7. Perlindungan pelapor (19,20,21) 8. Kepedulian pelanggan dan	Ordinal Likert 1-5	Tagora et al. (2022)

- 
- masyarakat  
(22,23,24)
9. Prosedur investigasi  
(25,26,27)
10. Pengungkapan  
kepada pihak  
eksternal (28,29,30)
- 

### **3.6 Metode Analisis Data**

Adapun Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, dengan digunakannya teknik analisis kuantitatif diharapkan akan mendapatkan hasil yang akurat tentang responden yang diberikan oleh responden sehingga data yang didapat dapat diolah menggunakan metode statistik.

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang variabel yang akan diteliti. Ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai deviasi yang ditemukan dalam dataset penelitian.

#### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

Data penelitian ini berasal dari kuesioner yang dibagikan, kemampuan dan keseriusan responden dalam menjawab sangat penting karena menjadi alat ukur yang akan diuji menentukan hasil penelitian. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dapat dilanjutkan dan apakah penelitian lebih lanjut layak dilakukan. Dalam mengolah data penelitian ini menggunakan SPSS 25. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini adalah penjelasannya:

##### a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu kuesioner penelitian dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu menggambarkan dan mengungkapkan sesuatu yang

diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, dapat disimpulkan uji validitas tersebut adalah pengujian untuk mengukur apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kita sudah benar menunjukkan yang akan kita ukur (Ghozali, 2018). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* adalah dengan menghitung nilai korelasi yang diperoleh dari nilai dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Apabila hasil *Pearson Correlation* memiliki nilai di bawah nilai r tabel maka data yang dihasilkan valid (Ghozali, 2018).

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang indikator dari variabelnya tersebut bersifat konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel dan andal jika jawaban dari individu tersebut bersifat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Repeated Measure* (pengukuran ulang): Pada kondisi ini responden akan diberikan pertanyaan yang sama dengan kondisi yang berbeda, apakah orang tersebut akan konsisten dengan jawaban tersebut.
2. *One Shot* (pengukuran sekali saja): pengukuran akan dilakukan sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan pada pertanyaan lain atau dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas dalam mengukur reliabilitas tersebut dengan menggunakan uji Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel yang bersifat konstruk dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $>0.70$  (Nunnaly, 1994).

#### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik ini bertujuan menguji kelayakan model penelitian dan melihat apakah adanya pelanggaran uji asumsi klasik terhadap model penelitian regresi berganda. Karena model penelitian yang baik yaitu model yang lulus pengujian asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik telah terdapat tiga asumsi dasar yang menjadi dasar pengukuran agar tidak dianggap bias, di antaranya:

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual model regresi memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2016). Data dapat dianggap normal jika signifikansi  $> 0,05$  dan Sebaliknya jika  $< 0,05$  maka tidak normal.

### 2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya variabel independen yang mempunyai kemiripan dengan variabel independen lain pada suatu model (Sujarweni,2019). Salah satu cara untuk menemukan gejala multikolinearitas yaitu dengan melihat *tolerance value* atau *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan nilai  $VIF > 10$  atau nilai  $tolerance \leq 0,10$  maka terdapat multikolinearitas yang tinggi dan sebaliknya.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menemukan apakah ada ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu adalah model yang tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Pedoman dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan memakai uji glejser, yaitu:

- Jika nilai signifikan  $> 0,05$ , maka tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi
- Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi

### **3.6.4 Pengujian Hipotesis**

Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisa terlebih dahulu secara benar agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban yang tepat dari

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan beberapa jenis uji, yaitu:

a. Analisis Regresi linier berganda

Uji analisis berganda yaitu digunakan menguji adanya pengaruh variabel-variabel independen kepada variabel dependen. Persamaan regresi dalam menguji hipotesis ini adalah sebagai berikut: Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda, Analisis regresi linier berganda yaitu metode analisis yang digunakan untuk menentukan ketepatan dari prediksi pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

$\alpha$	: konstanta
$\beta_{1,2,3}$	: koefisien regresi dari variabel independen
$Y$	: Kualitas Laporan Keuangan
$X_1$	: Kompetensi SDM
$X_2$	: Sistem Pengendalian Internal (SPI)
$X_3$	: Pengawasan Internal (PI)
$e$	: error

b. R2 Determinasi

Koefisien determinasi (R2) mengukur kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 berada direntang 0-1. Nilai R2 mendekati 0 yang berarti variabel-variabel independen kurang dapat menjelaskan variabel-variabel dependen, Nilai R2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independen dapat mendeskripsikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi beberapa variabel dependen. Umumnya, nilai R2 dalam data silang waktu relatif

rendah disebabkan terdapat variasi besar disetiap pengamatan, sedangkan dalam data runtun waktu, nilai R2 relatif tinggi.

### c. Analisis Regresi Modersi

Moderated Regression Analysis (MRA). Moderated Regression Analysis (MRA) yaitu persamaan model regresi data panel variabel moderasi, pada persamaan regresinya terdapat interaksi perkalian di antara variabel independen yang satu serta variabel lainnya. Variabel moderasi ialah *Fraud Control Plan* (Z).

Berikut ini adalah persamaan umumnya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{SDM} + \beta_2 X_{SPI} + \beta_3 X_{PI} + \beta_4 Z_{Fraud} + \beta_5 SDM * PF + \beta_6 SPI * PF + \beta_7 PI * PF + e$$

Di mana:

$Y$	= Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD)
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 X_{SDM}$	= Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
$\beta_2 X_{SPI}$	= Sistem Pengendalian Internal (SPI)
$\beta_3 X_{PI}$	= Pengawasan Intern (PI) terhadap kualitas LKPD
$\beta_4 Z_{Fraud}$	= <i>Fraud Control Plan</i> terhadap kualitas LKPD
$\beta_5 SDM * PF$	= Interaksi Kompetensi SDM dengan <i>Fraud Control Plan</i>
$\beta_6 SPI * PF$	= Interaksi Sistem Pengendalian Internal dengan <i>Fraud Control Plan</i>
$\beta_7 PI * PF$	= Interaksi Pengawasan Intern dengan <i>Fraud Control Plan</i>
$e$	= Error (faktor pengganggu atau residual)

### c. Uji F

Uji F dalam regresi linier berganda digunakan dalam menguji hipotesis yaitu b1, b2, dan b3 bersama-sama sama dengan nol. Uji hipotesis ini dikenal sebagai uji signifikansi secara keseluruhan dengan garis regresi yang telah estimasi atau diobservasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X1,X2, dan X3. Menurut (Ghozali,2018) dalam menguji hipotesis ini menggunakan statistik F atas kriteria

pengambilan keputusan berikut ini; • Quick look: apabila nilai F lebih besar dari 4 maka  $H_0$  akan ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Artinya menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa semua variabel independent secara signifikan dan serentak berpengaruh terhadap variabel terikatnya (dependen) • Perbandingan nilai F hasil perhitungan terhadap nilai F seperti tabel. Apabila nilai F hitung bernilai lebih besar daripada nilai F tabel, berarti  $H_0$  ditolak dan menerima HA.

### **3.7 Pilot Test (*Preliminary Research*)**

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria responden yaitu pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada pegawai yang bertugas di bagian akuntansi dan pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pilot test menggunakan skala kecil responden yaitu sebanyak 30 responden,

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang menurut Sugiyono (2017), berperan sebagai alat ukur esensial untuk mengumpulkan informasi secara objektif mengenai karakteristik berbagai variabel yang diteliti. Validitas dan reliabilitas instrumen menjadi perhatian utama, mengingat integritas dan kualitas data sangat bergantung pada efektivitas instrumen tersebut.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui platform *Google Form*. Setelah memperoleh persetujuan izin penelitian, peneliti menghubungi pihak sekretariat BPKAD dan menyebarkan tautan kuesioner melalui aplikasi *WhatsApp* kepada pegawai yang memenuhi kriteria. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden yang mengisi kuesioner merupakan individu yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

### **3.7.1 Uji Validitas**

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas diuji dengan cara mengorelasikan skor masing-masing item terhadap total skor konstruknya. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai Pearson Correlation yang dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5% (dua arah) dengan  $n = 135$  ( $r$  tabel = 0,170). Jika  $r$  hitung >  $r$  tabel, maka item dinyatakan valid Sugiyono (2017).

#### **3.7.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 3.3, seluruh indikator pada variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai Pearson Correlation di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat 0,01, sehingga dinyatakan valid.

**Tabel 3.3 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Indikator	Pearson Correlation	Kesimpulan
SDM1	0.954	Valid
SDM2	0.906	Valid
SDM3	0.877	Valid
SDM4	0.940	Valid
SDM5	0.897	Valid
SDM6	0.915	Valid
SDM7	0.869	Valid
SDM8	0.921	Valid
SDM9	0.898	Valid
SDM10	0.932	Valid
SDM11	0.907	Valid
SDM12	0.923	Valid

Karena seluruh nilai *Pearson Correlation* berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat 0.01 ( $p < 0.01$ ), maka semua indikator valid dalam mengukur variabel SDM (Kompetensi Sumber Daya Manusia).

#### **3.7.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.4, semua item pada variabel SPIP memiliki nilai korelasi yang signifikan dan berada di atas nilai  $r$  tabel. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dalam mengukur variabel SPIP.

**Tabel 3.4 Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Indikator	Pearson Correlation	Kesimpulan
SPIP1	0.881	Valid
SPIP2	0.863	Valid
SPIP3	0.917	Valid
SPIP4	0.923	Valid
SPIP5	0.954	Valid
SPIP6	0.936	Valid
SPIP7	0.923	Valid
SPIP8	0.837	Valid
SPIP9	0.943	Valid
SPIP10	0.893	Valid
SPIP11	0.900	Valid
SPIP12	0.919	Valid

Seluruh nilai *Pearson Correlation* berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat 0.01 ( $p < 0.01$ ), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

### 3.7.1.3 Pengawasan Intern

Pada Tabel 3.5, terlihat bahwa seluruh indikator pada variabel pengawasan intern memiliki korelasi kuat terhadap total skor konstruk, dengan nilai Pearson Correlation  $> 0.7$  dan signifikan pada tingkat 0.01. Maka, semua indikator dinyatakan valid.

**Tabel 3.5 Uji Validitas Pengawasan Intern**

Indikator	Pearson Correlation	Kesimpulan
PI1	0.949	Valid
PI2	0.861	Valid
PI3	0.924	Valid
PI4	0.908	Valid
PI5	0.819	Valid
PI6	0.923	Valid
PI7	0.942	Valid
PI8	0.914	Valid
PI9	0.934	Valid
PI10	0.942	Valid

Seluruh nilai *Pearson Correlation* berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat 0.01 ( $p < 0.01$ ), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel Pengawasan Intern.

### 3.7.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6, semua indikator pada variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap total skor konstruk, dengan nilai Pearson Correlation > 0.7. Oleh karena itu, semua indikator dinyatakan valid.

**Tabel 3.6 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Indikator	Pearson Correlation	Kesimpulan
KLK1	0.879	Valid
KLK2	0.844	Valid
KLK3	0.828	Valid
KLK4	0.862	Valid
KLK5	0.806	Valid
KLK6	0.821	Valid
KLK7	0.879	Valid
KLK8	0.901	Valid
KLK9	0.810	Valid
KLK10	0.904	Valid
KLK11	0.877	Valid
KLK12	0.857	Valid

Seluruh nilai *Pearson Correlation* berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat 0.01 ( $p < 0.01$ ), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 3.7.1.5 Fraud Control Plan

Pada Tabel 3.7, semua item pada variabel *Fraud Control Plan* memiliki nilai korelasi Pearson yang signifikan ( $p < 0.01$ ) dan berada jauh di atas nilai r tabel. Maka, seluruh indikator layak digunakan dalam pengukuran variabel ini.

**Tabel 3.7 Uji Validitas Fraud Control Plan**

Indikator	Pearson Correlation	Kesimpulan
F1	0.902	Valid
F2	0.908	Valid
F3	0.806	Valid
F4	0.927	Valid
F5	0.828	Valid
F6	0.939	Valid
F7	0.905	Valid
F8	0.910	Valid
F9	0.942	Valid
F10	0.948	Valid
F11	0.885	Valid

F12	0.946	Valid
F13	0.917	Valid
F14	0.933	Valid
F15	0.893	Valid
F16	0.831	Valid
F17	0.867	Valid
F18	0.860	Valid
F19	0.838	Valid
F20	0.804	Valid
F21	0.957	Valid

Seluruh nilai *Pearson Correlation* berada di atas 0,170 dan signifikan pada tingkat 0.01 ( $p < 0.01$ ), sehingga semua indikator valid dalam mengukur variabel *Fraud Control Plan*.

### 3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi internal antar-item dalam setiap variabel. Ukuran yang digunakan adalah Cronbach's Alpha, dengan batas minimal reliabilitas sebesar 0,7. Jika nilai Cronbach's Alpha  $> 0,7$ , maka instrumen dianggap reliabel. Hasil uji ditunjukkan pada Tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.8 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.981	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.981	Reliabel
Pengawasan Intern	0.980	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.976	Reliabel
<i>Fraud Control Plan</i>	0.987	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,170, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi dan dapat diandalkan untuk pengukuran lebih lanjut.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan *Fraud Control Plan* sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan beberapa temuan penting yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia , semakin baik kualitas laporan keuangan.
2. SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, menandakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
3. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, mengindikasikan bahwa pengawasan yang ketat meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketepatan waktu pelaporan.
4. *Fraud Control Plan* memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti kebijakan anti-fraud memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan.
5. *Fraud Control Plan* tidak dapat memoderasi pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa efektivitas SPIP dalam menjaga kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kebijakan *Fraud Control Plan*.
6. *Fraud Control Plan* memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan, yang menegaskan bahwa keberadaan kebijakan anti-fraud memperkuat dampak positif pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara ilmiah agar dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi penelitian di masa yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup aspek ruang lingkup, metode, dan pendekatan yang digunakan. Selama penelitian dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini tidak melakukan pembatasan pendidikan minimal responden sehingga hasil tidak sepenuhnya mencerminkan kualifikasi dalam menjawab kuesioner.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada institusi pemerintah, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di sektor lain seperti sektor swasta atau BUMN.
3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang cenderung terbatas dalam menggali aspek kualitatif yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka pada bagian ini disampaikan beberapa saran yang bersifat praktis dan akademis. Saran-saran ini ditujukan kepada pemangku kepentingan yang relevan, seperti pemerintah, institusi pendidikan, dan peneliti selanjutnya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola keuangan sektor publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik.

### **5.3.1 Saran untuk Pemerintah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa saran untuk Pemerintah yaitu:

1. Pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan

laporan keuangan guna penguatan kompetensi sumber daya manusia. Program ini harus mencakup aspek teknis akuntansi, regulasi keuangan, serta integritas dan transparansi dalam pelaporan.

2. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi SPIP dengan menetapkan standar evaluasi yang lebih ketat, melakukan audit berkala, serta memastikan kepatuhan instansi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mekanisme pengawasan internal hendaknya dapat diperbaiki dengan meningkatkan independensi auditor internal, memperjelas sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam proses audit.
4. Pemerintah perlu menerapkan strategi *Fraud Control Plan* yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, penggunaan teknologi berbasis *artificial intelligence system*, serta penguatan sanksi bagi pelanggar.

### **5.3.2 Saran untuk Institusi Pendidikan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa saran untuk Institusi Pendidikan yaitu:

1. Institusi pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan praktik nyata dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah dan sektor publik, termasuk pengendalian internal dan *Fraud Control Plan*.
2. Diharapkan mata kuliah yang berkaitan dengan etika profesi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan perlu diperkuat agar lulusan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya integritas dalam laporan keuangan.
3. Institusi pendidikan diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan institusi keuangan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa melalui program magang, studi kasus, atau seminar dengan praktisi keuangan.

### **5.3.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain, seperti budaya organisasi, penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi, atau jenis kepemimpinan dalam manajemen pemerintahan, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.
2. Penelitian di masa depan dapat menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-method*) dengan melibatkan wawancara, studi kasus, atau FGD guna menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.
3. Studi lebih lanjut dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau sektor industri yang berbeda untuk meningkatkan generalisasi temuan penelitian.

#### **5.4 Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, terutama dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan di sektor publik. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar untuk memperkuat kebijakan terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), optimalisasi sistem pengawasan internal, serta penerapan strategi *Fraud Control Plan* yang lebih efektif. Maka dari itu, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berbasis pada bukti empiris dan berorientasi pada peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan.

Bagi organisasi dan praktisi keuangan, penelitian ini menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan sistem pengawasan internal sebagai upaya menjaga keandalan laporan keuangan. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti, temuan ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan studi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, khususnya dalam konteks sektor publik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel atau menggunakan pendekatan yang lebih mendalam untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaporan keuangan dan mekanisme pengendaliannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2019). Survei *fraud* Indonesia 2019. Jakarta : ACFE *Indonesia Chapter 2020*
- Aditya, D. A. D., Baridwan, Z., & Mardiaty, E. (2023). *Locus Of Control Memoderasi whistleblowing System, Literasi Keuangan, Dan Tindakan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(3), 634-654.
- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117-132.
- Amriani, W. (2018). Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Akrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Kep. Selayar. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Anggreni, I. G. A. P., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(02), 490-500.
- Ansori, A. F. (2017). Pengaruh implementasi good university governance, keefektifan sistem pengendalian internal dan ketataan aturan akuntansi terhadap kecenderungan *Fraud* pada *PTKIN-BLU* (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG*).
- Arifuddina, A. I., & Mansurc, I. *Mediation of Asset Optimization on the Effect of Asset Inventory and Quality of Human Resources in the Quality of Regional Government Financial Reports in Indonesia*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9 (10), pp. 200-221, ISSN 2201-1315
- Astari, N. A. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Lampung). Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30715>
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977-989.
- Azis, A. D., & Zulma, G. W. M. (2023). *Does Business Environment Uncertainty Impact The Quality Of Financial Reporting?*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(3)..
- Bagjana, I. F. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan skpd di lingkungan pemerintah daerah kota cimahi* (Doctoral dissertation, Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama).Jurnal Aset; (Akuntansi Riset) Program Studi

- Akuntansi FPEB UPI, 13(2), 300–313.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2>
- Bawono,I.R.A Saroso, G.P. Yuniarso (2021) Menilai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan.AKRUAL:Jurnal Akuntansi
- BPK Perwakilan Provinsi Lampung. (2023) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022. <http://bpk.go.id/ihps>
- BPK Perwakilan Provinsi Lampung. (2023) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022. <http://bpk.go.id/ihps>
- Davis, H. James, Schoorman, E Davis, dan Donaldson lex, 1997. Toward to *Stewardship Theory of management*, *Academy of Management Review*. Vol.22. No.1.pp 20-47.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.
- Delanno, G. F., & Deviani, D. (2013). Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 21-46.
- Eris Lestari, A. (2025). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Prosedur Keuangan, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1609–1623. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1401>
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). *PEKBIS*, 12(1).
- Febrita, R. E., & Kristanto, A. B. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 157-177.
- Gea, O. O., & Putra, R. R. (2022). Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2517-2525.
- Griffin, Ricky W. (2004). Manajemen/ricky W. griffin diterjemahkan oleh Gina Gania – Ed 7, Jil. 1- Jakarta. Erlangga
- Ghozali, Imam. (2018). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Semarang: Yoga Pratama.
- Handoyo,B.R.M & Bayunitri.,B.I. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. IJFAM (Jurnal Internasional Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen,3(1) 46-64

- Harahap, Arman Sahri R. 2018. Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan sebagai Perwujudan Peran Akuntan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Paraikatte, Vol. 29, ISSN: 2086-4426.
- Hasibuan, Malayu. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kesembilan Belas. Jakarta: *PT. Bumi Aksara*
- Hendri, N., & Sari, S. U. (2023). *Sistematic Literature Review: The Strategy For Preventing Government Financial Report Fraud*. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 323-336.
- Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2022). Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada Tahun 2022. <http://dataindonesia.id>
- Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Indriani, A. (2021). Peran Pencegahan *Fraud* Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Financial and Tax*, 1(2).
- Innayatulloh,M.R, Siswantoro,D. Pengaruh Kualitas Manajemen Anggaran dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementrian dan Lembaga. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. (2019).
- Jauhari, H., & Hazisma, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104-121.
- Julita, S. (2018). Analysis of faktor affecting the quality of government financial report Bengkalis regency. *International Journal Of Scientific &Technology Research*, 7.
- Kaban, M. B. U., & Edwy, F. M. (2024). Kualitas Laporan Keuangan: Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Internasional Cfo. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 25-44.
- Karyono. (2013). Penipuan Forensik, Edisi 1. Yogyakarta: CV Andi Offset. Karyono. (2013). Penipuan Forensik, Edisi 1. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kasannudin, Mukhamad. 2011. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Demak. Skripsi. Semarang: Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.  
<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/132/>.
- Kolit, Y. A. D. D., Wahidahwati, W., & Mildawati, T. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Lingkungan Eksternal. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2072-2082.
- Koto, A. N. S. (2019). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian

- Intern Sebagai Variabel Intervening (*Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah*).
- Kuntadi, C., Suryadi,D.,Anggriawan. G. (2023) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi: Opini Audit, Laporan Audit, Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit. *Journal Of Accounting and Finance Management(JAFM)* 4(1)2721-3005
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 91-97.
- Larum, K., Zuhroh, D., & Subiyantoro, E. (2021). *Fraudulent Financial Reporting: Menguji Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan dengan Menggunakan Teori Fraud Hexagon*. *AFRE Accounting and Financial Review*, 4(1), 82-94.
- Lestari, r. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap kinerja pegawai pemerintah provinsi Lampung. *IJEBE*, 47-59.
- Lisa, O., & Halim, A. (2023). Konstruksi Model Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 20-34.
- Lorenza, R., Setiawati, E., & Bawono, A. D. B. (2018). *The Influence of Village Apparatus Competence, Compliance with Financial Reporting and Internal Control Systems on Fraud Prevention with Moral Sensitivity as A Moderation Variabel*.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32.
- Malindar, B., Sairmaly, F. A., Nifanngeljau, J., & Laratman, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Sosialisasi Standar Akuntansi Dan Skala Bisnis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Emkm. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 153-168.
- Manik, T. (2020). Analisis pengaruh pencegahan kecurangan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan tata kelola pemerintahan daerah sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 49-62.
- Manik, T., & Kusasi, F. (2019). Kualitas laporan keuangan dan pencegahan *Fraud* di Provinsi KEPRI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(1), 17-32.

- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan *Fraud* Di Pemerintah Daerah, Indonesia (Exploration Opportunities To Commit *Fraud* in Local Governments, Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1.
- Mariasari, V. (2023). Pengaruh Kekayaan Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 110-134.
- Marlina, 2018, Digitalisasi Bank terhadap Peningkapan Layanan dan kepuasan Nasabah Bank, *Jurnal Ilmiah Inovator*, edisi maret 2018
- Maulida.W.Y. & Bayunitri.B.I. (2021) Pengaruh Sistem Wistleblowing terhadap Pencegahan Penipuan. IJFAM (Jurnal Internasional Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen), 2(4) 275-294
- Milgram, Stanley, 1963, *Behavioral Study of Obodience, The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Mintozah, K. J. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa.
- Muda, I., Harahap, A. H., Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. (2018, March). Faktors of quality of financial report of local government in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012067). IOP Publishing.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP/PP NO. 60 TAHUN 2008) dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7(2), 102-116.
- Ndraha, T. 1987. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : Bina Aksara.
- Nainggolan, A., & Tarigan, S. Y. B. (2021). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(2), 113-120.
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- Noholo, S. (2021). Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan intervening pencegahan *fraud*. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 136-147.

- Nugroho, N. I., & Murtanto, M. (2024). Pengaruh *Fraud Hexagon*, Internal Control, Dan Financial Distress Terhadap Pendekripsi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 45-66.
- Nunnally, Bernstein, I.H. 1994. *Psychometric Theory*, Edisi ke 3. New York : McGraw Hill
- Omoregie, N. A., & Usifo, J. E. (2020). Faktors Affecting Financial Reporting Quality In Nigeria Public Sector. *Int. j. of Social Science and Economic Research*, 5(5), 1172-1185.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori *Stewardship*: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 419-432.
- Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 461-474. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463>
- Parinding, S., Sari, N., & Ayu Dasila, R. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Palopo. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, 16(1), 97-111.
- Ponamon, I. F. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Prinanda, B., Safira, D., Saputri, D. W., Khoiriah, E., & Sisdianto, E. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 04-11.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Purba, S., & Purba, R. (2023). Determinasi Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 137-152.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145-159.
- Prabadianti, E. A., & Erawati, T. (2023). Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemahaman Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(2), 227-235.
- Purwasih, R. (2023). Perkembangan Terkini Riset Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 34-38.

- Qomah, S. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95-108.
- Raharjo, Eko. 2007. Teory agency dan Teori *Stewardship* Dalam Perspektif Akuntansi . Fokus Ekonomi 37-46
- Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: peran sistem pengendalian internal sebagai pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 346-359.
- Ramadhan, A., Fadilah, H., Nurjanah, P., & Harahap, N. H. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tirtanadi (Cabang Tuasan-Medan, Sumatera Utara). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(1), 190-196.
- Ridjal, S. (2022). Dapatkah Literasi Keuangan Dan Pemahaman Akuntansi Menghasilkan Kualitas Laporan Keuangan Puskemas?. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 261-278.
- Rivai, Veithzal. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta : Rajawali Pers.108.
- Rohman, A. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi*. Vol. 7 No. 2. Januari.
- Roni, M., Husnan, L. H., & Fitriah, N. (2019). Determinan kualitas laporan keuangan satuan kerja di wilayah pembayaran kantor pelayanan perbendaharaan negara mataram. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), 175-187.
- Roreng, P. P., Bandhaso, M., & Tandirerung, C. J. (2021). Competency analysis of human resources and the use of information technology on the quality of financial reports in the local government of the city of makassar. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1218-1222.
- Sari, A., & Widiatmoko, J. (2023). Peran Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 826-837.
- Santoso, L., & Bimo, I. D. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi Ketidakpastian Lingkungan: Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi Ketidakpastian Lingkungan. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 163-175.
- Savira, D., Siboro, S. F., & Shafa, S. (2024). Peran Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi*, 3(2), 226-235.
- Sugiyono.2019.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Bandung.

- Suhendro, S., Sembiring, S.I.O., (2023) Pencegahan *fraud* dengan *Fraud Control Plan*: Kasus Pada Manajemen Rumah Sakit BLUD Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Keuangan (JAK)* 28(2), 146-156
- Sundari, S., & Sudibyo, Y. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 111-119.
- Sunyoto, Danang. 2012. Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS
- Tagora, A., & Putriana, V. T. (2022). Mekanisme dan implementasi *Fraud Control Plan*: Studi kasus pada rumah sakit umum daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perpendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(2), 133-144.
- Ternalemta, T., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(1), 38-50.
- Thorton D Deborah 2009. *Stewardship In Government Spending Accountability, Tranparancy, earmarks and Competition*, Policy study no. 09-1. Publick Interst Institute
- Tuanakota Theodorus M, 2007, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*, Jakarta: Penerbit FEUI. Tullah, R. H., & Farhan, R. (2023). *Faktors Affecting The Quality of Financial Reports: A Systematic Literature Review*. *International Journal Of Trends In Accounting Research*, 4(1), 59-58.
- Utami, H. P. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (*Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*).
- Warther, W. B. dan Darren, G. D. 1996. Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: *Gramedia Pustaka Utama*.
- Widaryani, H. U. (2020). Analysis of Factors Affecting the Quality of Local Government Financial Statements. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 53-59.
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 15-28.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345.
- Winardi. 2001. Motivasi Dan Pemotivasiyan Dalam Manajemen. Cetakan Pertama. Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap

- pencegahan *Fraud* dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63-89.
- Yahya,I. (2018) *Fiscal decentralizatipn Implementation on Quality Regional Financial Report in distric/City Government (Case in Indonesia)*. *International Journal of Civil Engineering and Technologi* (9),pp. 569-584.
- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi financial statement *Fraud*: Pengujian dengan *Fraud diamond*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(1), 49.
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal akuntansi dan auditing indonesia*, 17(2), 166-175

